

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya patriarki merupakan budaya ketidaksetaraan gender di mana adanya dominasi laki-laki di atas kaum perempuan. Sebelumnya, budaya patriarki terfokus pada kemampuan laki-laki untuk mengambil alih pekerjaan perempuan dalam pekerjaan dengan upah, hingga budaya ini merambah ke keluarga. Sehingga budaya ini terus-menerus ada dari generasi ke generasi. Patriarki yang sudah mengakar menjadi sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik di mana laki-laki mendominasi dan men-subordinasi perempuan.¹

Walby membedakan budaya patriarki menjadi dua bentuk, yaitu patriarki privat dan patriarki publik. Di dalam patriarki privat laki-laki ada pada posisi sebagai suami atau ayah yang merupakan penerima manfaat langsung secara individu dari subordinasi perempuan. Sementara, dalam patriarki publik terdapat sebuah bentuk di mana perempuan memiliki akses baik di arena publik maupun privat. Mereka tidak dilarang untuk berada di arena-arena publik, tetapi mereka tetap ter-subordinasi di dalamnya. Penindasan perempuan dilakukan lebih secara kolektif atau terstruktur daripada oleh individu patriarki.

Subordinasi merupakan sikap atau tindakan masyarakat dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan membedakan peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dinilai bertanggung jawab dalam memilih peran pada urusan domestik atau reproduksi, sementara

¹ Sylvia Walby, *Teorisi Patriarki*, (Yogyakarta: Jala Sutra, 2014), hlm. 28.

laki-laki pada urusan publik atau produksi. Hal itu terjadi karena adanya keyakinan terhadap jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih unggul ialah laki-laki, telah dikonsepsikan secara turun temurun.²

Laki-laki menjadi superordinat di berbagai aspek kehidupan. Hubungan dengan perempuan dijalankan didasari pemahaman mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas terhadap perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah sehingga harus berada di bawah kekuasaan para laki-laki. Perbedaan yang terjadi kepada kaum perempuan dimulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal sampai ke lingkungan kerja. Kaum perempuan seringkali kurang diberi kesempatan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial apabila dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena, realitas, dan fakta-fakta sosial budaya memperlihatkan dengan jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang timpang, tidak setara, dan diskriminatif.

Kodrati perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan secara kodrati ini tidak sampai membedakan perempuan dan laki-laki dalam hal posisi kedudukan namun dapat menentukan perannya dalam kehidupan. Dari segi fungsi fisik reproduksi perempuan memungkinkan mengandung calon keturunannya karena perempuan mempunyai rahim yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Demikian juga dalam hal pengasuhan dan keberlangsungan bayi, perempuan dianugerahkan kemampuan untuk menyusui dan perasaan kasih sayang serta ketahanan tubuh yang lebih dibanding dengan laki-laki.

Perbedaan yang ada antara perempuan dengan laki-laki seharusnya tidak menjadi sebuah masalah yang bisa menyebabkan ketimpangan diantara keduanya. Banyak pandangan yang seakan-akan menilai bahwa posisi perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

² Muhammad Nawir dan Risfaisal, “*Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga*”. Jurnal Equilibrium, Vol III, No. 1, Mei 2015, hlm. 31

Laki-laki memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada perempuan dalam segala hal, termasuk di dalam keluarga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan itu terjadi diantaranya, faktor biologis atau genetis merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat dirubah karena sudah berasal dari lahir. Sedangkan terdapat juga faktor lingkungan berhubungan dengan adanya perbedaan peranan antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan hanya dibatasi dalam peranan domestik dimana hanya mengurus persoalan yang ada di dalam rumah tangga saja, sedangkan laki-laki mendapat peranan yang dinilai lebih tinggi dari perempuan dan bervariasi, tentunya di luar dengan yang berhubungan dengan urusan kerumahtanggaan. Sehingga timbul sebuah asumsi bahwa di dalam keluarga laki-laki lebih memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Tindakan subordinasi oleh laki-laki kepada perempuan adalah bagian dari sistem kontrol yang berusaha menegaskan kedudukan yang tidak setara diantara dua jenis kelamin tersebut. Berdasarkan hal ini, prasangka gender lalu muncul sebagai upaya diskriminasi terhadap eksistensi pihak yang ter-subordinat. Pandangan dan perlakuan laki-laki terhadap perempuan yang mengakar dan dilegalkan oleh beberapa lembaga-lembaga patriarki membuat perempuan harus mengikuti ideologi ketidaksetaraan gender tersebut. Pada akhirnya perempuan bukan hanya memunculkan perilaku inferior dalam hubungannya dengan pihak laki-laki. Akan tetapi, perempuan juga membentuk citra inferior dan menggiring diri sendiri ke posisi subordinat dalam hubungannya dengan sesama perempuan.

Dalam masalah gender, terdapat teori sosial-konflik yang sering diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuat pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang bersama oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari

penindasan kelas yang berkuasa di dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga.³ Hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda dengan hubungan kaum ploreter dan borjuis, para hamba dan tuan, atau para pemerias dan yang diperias. Dengan begitu, ketimpangan peran gender di dalam masyarakat tidak disebabkan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena adanya konstruksi masyarakat.

Ketidakadilan gender yang berimbas pada posisi kaum perempuan dilahirkan karena adanya pemahaman yang salah mengenai perbedaan gender. Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender berdasar pada anggapan dan nilai yang dibuat konstruksi sosial dan pada akhirnya menimbulkan sifat stereotip yang dianggap masyarakat sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan dari Tuhan. Sifat dan stereotip yang sebenarnya merupakan konstruksi atau rekayasa sosial pada akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural, dalam proses yang sangat panjang dan akhirnya telah berakibat terkondisinya beberapa posisi perempuan. Langgengnya posisi subordinasi, stereotip dan kekerasan terhadap perempuan ini secara tidak sadar juga dijalankan oleh ideologi dan budaya patriarki, yaitu ideologi yang berdasar pada kekuasaan laki-laki. Ideologi ini ada di dalam kepala kaum laki-laki maupun perempuan, juga dalam tafsir agama bias gender yang sangat berpengaruh pada kebijakan negara serta birokrasi pembangunan.⁴

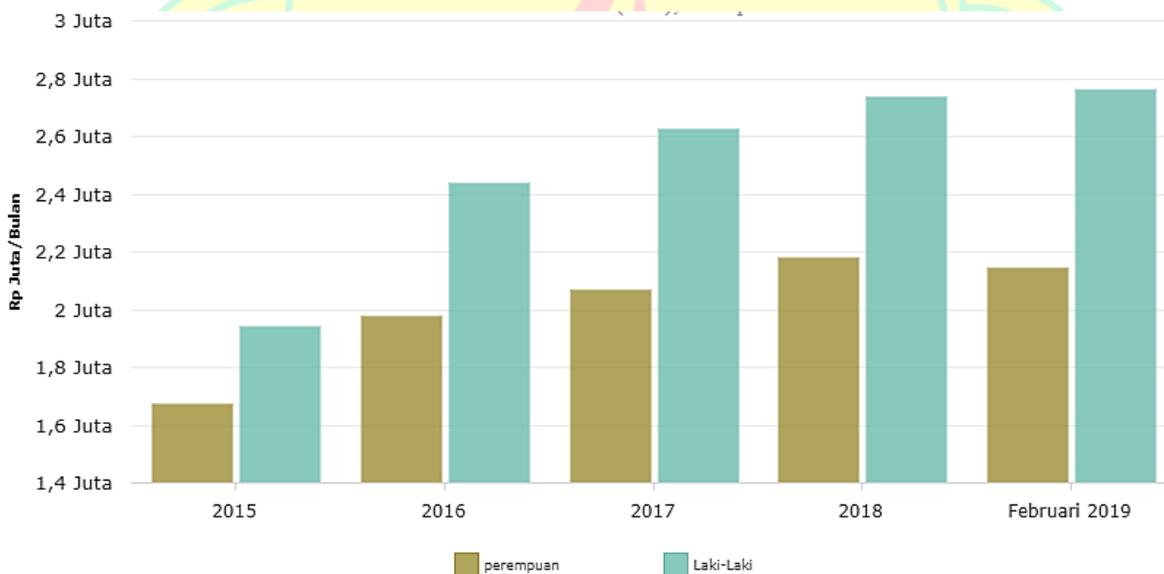
Konstruksi sosial yang terjadi dalam kaitan gender melahirkan ketidakadilan bagi laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Terdapat banyak wujud ketidakadilan gender diantaranya stereotip dan subordinasi. Subordinasi ialah anggapan bahwa perempuan adalah makhluk irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak dibolehkan memimpin. Masyarakat menganggap bahwa jenis “pekerjaan perempuan”, seperti pekerjaan domestik, dianggap dan

³ Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender”. Jurnal Civics, Vol.4, No.2, Desember 2007, hlm.71

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 147-157

dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Selain itu, pekerjaan perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif dan tidak diperhitungkan dalam statistik negara. Maka akibatnya, upah yang diberikan kepada pekerja perempuan lebih sedikit daripada pekerja laki-laki meskipun bukan berarti beban kerja perempuan lebih ringan dibanding beban kerja laki-laki.

Gambar 1.1 Rata-Rata Upah Pekerja Berdasarkan Gender 2016-2018



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Perekonomian 2019 mencatat kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selama periode 2015-Februari 2019, selisihnya mencapai Rp 492,2 ribu.

Adapun secara rinci, selisih pada 2015 sebesar Rp 269 ribu, Rp 458,4 ribu (2016), Rp 554 ribu (2017), dan Rp 560,6 ribu (2018). Sementara hingga Februari 2019, kesenjangan semakin lebar hingga Rp 618,8 ribu. BPS juga menyebutkan kesenjangan upah ini merupakan isu yang

lama karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah.⁵

Perbedaan ranah pekerjaan inilah yang sering menstereotipekan perempuan sebagai jenis kelamin yang dianggap tidak lebih mampu dibanding laki-laki untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonomi. Laki-laki dianggap lebih mampu untuk bertindak dan menjalankan sumber daya ekonomi seperti memimpin dan manajemen perusahaan.

Subordinasi perempuan yang berkembang dalam budaya patriarki, menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang diuntungkan baik dari segi sosial, ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena perbedaan posisi ekonomi yang lebih lemah berpengaruh terhadap proses komunikasi dan proses negosiasi dalam forum pengambilan keputusan, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di masyarakat luas. Sebenarnya, secara sederhana bisa dianalisa bahwa bila perempuan dan laki-laki tidak dibedakan peranan berdasarkan gendernya, maka peningkatan ekonomi di dalam keluarga maupun skala ekonomi makro dalam pembangunan daerah akan lebih cepat terwujud karena terbukanya kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan manfaat dan prioritas dari berbagai hasil pembangunan.

Proses dalam ideologi gender telah menciptakan berbagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini terproses melalui tradisi sehingga mereka yang ada di dalamnya menjadi tidak sadar bahwa yang terjadi adalah hasil buatan manusia. Dalam proses sejarah manusia, masyarakat mencampuradukan pengertian jenis kelamin atau seks dengan gender sehingga terjadi salah pengertian. Pengertian *nature* dan *nurture* dicampuradukkan oleh masyarakat sehingga menjadi

⁵ Dwi Hadya Jayani, “Perempuan Indonesia Digaji Lebih Rendah dari Pekerja Laki-laki” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar-gender-semakin-melebar>), diakses pada 29 September 2020.

tidak dapat dibedakan apa yang sebenarnya bisa diubah dengan apa yang tidak. Teori *nature* menganggap bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis kedua insan tersebut. Sementara, dalam teori *nurture* menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh proses belajar atau sosialisasi manusia yang berasal dari lingkungannya. Secara *nature* perbedaan laki-laki dan perempuan berasal dari kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, secara *nurture* yang menentukan perbedaan laki-laki dan perempuan adalah masyarakat di lingkungannya sendiri.⁶ Sesuatu yang telah membudaya bahwa laki-laki dianggap memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan. Laki-laki secara kodrat memiliki fisik yang lebih kuat. Laki-laki dianggap bertindak lebih rasional, sedangkan perempuan dianggap lebih banyak irasional. Akibatnya, terjadilah ketimpangan-ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Dalam proses selanjutnya, hal tersebut dapat menyebabkan terbentuknya pandangan bahwa posisi perempuan berada dibawah laki-laki yaitu sebagai subordinat. Laki-laki selalu menjadi pemimpin sedangkan perempuan menjadi pihak yang selalu dipimpin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak sejajar atau timpang. Tidak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi (peribahasa), tetapi kedudukannya terjadi secara vertikal. Laki-laki yang berada di atas, sementara perempuan berada di bawah. Kehidupan perempuan secara sosial berada di bawah bayang-bayang laki-laki.

Masyarakat Arab merupakan salah satu ras bangsa besar di dunia yang melakukan diaspora ke berbagai negara. Masyarakat Arab mulai berdatangan secara massal ke Nusantara pada tahun-

⁶ Vina Salviana D. Soedarwo dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, (Banten: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 7.

tahun terakhir di abad ke-18, tetapi banyak dari mereka mulai yang menetap di pulau Jawa setelah tahun 1820. Sejak permulaan abad-19 masyarakat Arab sudah bermukim di berbagai kota Maritim di Indonesia khususnya di Batavia yang saat ini sudah berubah namanya menjadi Jakarta, kebanyakan dari mereka adalah para pedagang.

Kondisi mereka yang merantau sendiri tanpa istri dan dengan waktu tunggu yang cukup panjang menyebabkan mereka menjalin hubungan kekeluargaan dengan perempuan pribumi melalui pernikahan. Beberapa laki-laki Arab berpoligami dari istri pertama mereka yang berada di kampung halaman dengan perempuan pribumi. Dari jalan dakwah dan jalan pernikahan sangat menentukan pemukiman yang ditempati oleh masyarakat keturunan Arab khususnya di Jakarta, hasil survey memperlihatkan mengenai jumlah masyarakat Arab di Jakarta sampai pada tahun 1885, yakni sekitar 1.448 jiwa.⁷

Kebudayaan Arab seringkali dikaitkan dengan ajaran atau syariat agama Islam. Dalam penerapannya beberapa budaya Arab memang mengambil dari ajaran dari Islam seperti dari budaya berbusana yang memanjang dan menutupi bagian-bagian tubuh yang dinilai tidak boleh terlihat antara laki maupun perempuan atau yang sering disebut aurat. Dalam perkembangannya budaya Arab dicerminkan sebagai representasi Islam. Budaya patriarki yang menjamur di daratan Arab dijadikan alasan sebagai patokan ke-Islaman. Dengan laki-laki dianggap sebagai pemimpin maka perempuan sering dianggap hanya sebagai pengelola urusan domestik.

Banyak perempuan Arab dihadapkan dengan norma-norma dan praktik-praktik budaya yang menurutnya perempuan merupakan ancaman potensial terhadap kehormatan keluarga dan sebagian besar termasuk dalam keluarga dan ruang pribadi. Norma-norma ini, yang sering

⁷ Zulkarnen, "Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta". Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 3, Maret 2018, hlm. 137

memiliki dasar dalam adat dan tradisi kesukuan, menghambat akses perempuan ke pendidikan dan partisipasi dalam angkatan kerja dan ruang publik yang lebih luas. Dalam beberapa kasus norma-norma tersebut berkontribusi pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Adanya lembaga yang mewadahi persoalan seluruh Masyarakat Arab di Jakarta dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para Ulama Arab terdahulu, menjadi alasan kuat setiap keluarga untuk mengikuti tradisi agar terhindar dari aib dan malu keluarga terhadap kelompoknya. Aturan pergaulan laki-laki dan perempuan telah dibedakan sejak kecil, karena seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah sendiri tanpa ditemani oleh saudara laki-laki atau ayahnya.

Dengan cerminan seperti itu maka Islam sering kali dianggap sebagai ajaran yang sedemikian patriarkis. Padahal Nabi Muhammad mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada peran sosial mereka. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah memisahkan antara budaya patriarki Arab dengan ajaran Islam yang menerminkan kesetaraan.

Hampir seluruh argumentasi mengenai kajian gender berawal dari suatu asumsi, bahwa perbedaan gender, bahkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi melalui proses sejarah yang panjang dan dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, termasuk melalui tradisi keagamaan. Sebagaimana sifat tradisi dan kebiasaan lainnya, proses panjang pembentukan gender, pada umumnya juga sebagai suatu proses yang tidak disadari sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya natural, kodrati dan ketentuan Tuhan.

Pergulatan identitas para orang Arab-Hadrami sebagai akibat dari diaspora, dapat dirujuk melalui fenomena diaspora “tua”, yang sudah berlangsung dalam skala yang besar dimulai saat

pertengahan abad ke-18 sampai akhir 1950-an. Di tengah gencar diskriminasi yang diberlakukan oleh Kolonial Belanda, orang Arab-Hadrami memainkan peranan mereka baik di bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Di tempat yang baru, para imigran Hadrami ini turut mengambil bagian dalam memperluas pasar bisnis, memperoleh kesejahteraan, dan mengirimkannya kembali ke kampung halaman Hadramaut. Kontak antara Jawa dan Hadramaut ini sekaligus menjadi gambaran eksistensi komunitas orang Arab Hadrami di kawasan Asia Tenggara. Para pelaku diaspora Hadrami, tidak hanya mengirimkan uang kepada sanak keluarga mereka, tetapi juga mengirimkan anak-anak mereka ke Hadramaut untuk mengenyam pendidikan. Orang-orang Hadrami banyak dipengaruhi oleh masyarakat lokal baik itu secara sosial maupun budaya. Mereka tidak berlaku pasif pada kondisi-kondisi baru yang mengelilingi kehidupan mereka. Bahkan, beberapa dari mereka berpengaruh sangat kuat dalam kehidupan masyarakat lokal, sebagai contoh adalah di dalam bidang pengajaran dan pendidikan Islam. Secara umum, ketika beberapa pelaku dari diaspora Hadrami tetap melestarikan kebiasaan dan identitas Hadrami, beberapa dari mereka justru mempraktikkan kreativitas sosial dan budaya sebagai upaya untuk melebur dengan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Nusantara.⁸

Pada awal abad ke-20, diaspora Hadrami berhasil mendirikan institusi-institusi pendidikan modern, seperti Jam'iyat Khair dan juga Jam'iyah Al-Islah wa Al-Irsyad (Al-Irsyad). Kedua lembaga pendidikan ini menghasilkan dua kelompok besar dalam internal komunitas Arab-Hadrami, yakni tradisional (Jam'iyat Khair) yang diisi oleh golongan para Alawiyin (Ar-Rabithah) dan yang kedua diisi oleh golongan reformis (Al-Irsyad). Pada fase tersebut adalah saat kemunculan intelektual-intelektual “baru” yang “progresif” serta terlibat aktif dalam beberapa

⁸ Rabith Jihan Amaruli, Nazala Noor Maulany, Singgih Tri Sulistiyono, “*Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadrami di Indonesia*”. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 122-123.

diskursus dan menjadi motor penggerak kebangkitan orang Arab-Hadrami di Indonesia, baik itu dari golongan non-sayyid maupun golongan sayyid.⁹

Kebanyakan dari Peranakan Arab di Indonesia melakukan pernikahan endogami demi mempertahankan eksistensi kelompoknya. Masyarakat keturunan Arab Indonesia mewariskan stratifikasi sosial sesuai dengan yang terdapat di tanah leluhur mereka. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Penganut patriarki dalam budaya patrilineal menganggap bahwa laki-laki membawa keturunan sedangkan perempuan tidak. Sehingga apabila dalam keluarga memiliki anak perempuan Peranakan Arab, maka ia dipaksa agar menikah dengan seorang laki-laki sayyid pilihan keluarganya. Hal tersebut terus dilakukan untuk mempertahankan keturunan nabi dengan istilah *kafa'ah syarifah*.¹⁰

Syarifah merupakan gelar yang diberikan untuk seorang perempuan dan sayyid untuk laki-laki keturunan Arab yang masih termasuk dalam golongan Ahl-bait atau Ba'alawy atau Al-Awiyin. Seorang syarifah diwajibkan menikah dengan seorang sayyid agar tidak memutuskan keturunan yang sudah ada saat ini. Tradisi “kemuliaan sebagai seorang sayyid dan syarifah” menjadi rantai untuk membelenggu hak asasi manusia baik sayyid dan terlebih untuk syarifah.”¹¹

Alawiyin sendiri adalah kelompok klen patrilineal yang dapat terlihat dalam penggunaan nama keluarga setelah nama kecil atau nama depan mereka. Oleh karena itu, jalur keturunan mereka dapat dengan mudah ditelusuri berasal dari klen besar patrilineal yang sama dengan di daerah asal yakni Hadramaut yang berada di Yaman. Kelompok masyarakat ini mempunyai

⁹ Sayyid: Gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad.

¹⁰ Kiki Sakinatul Fuad, Tesis: “*Posisi perempuan Keturunan Arab dalam Budaya Perjudohan*”. (Depok :Universitas Indonesia, 2005), hlm. 64.

¹¹ M Hasyim Assegaf. *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 197.

anggapan bahwa kelompok diantara mereka memiliki status tinggi, menengah, dan bawah bahkan terstruktur.

Masyarakat Alawiyyin merupakan golongan sangat terpandang di dalam kelompok masyarakat Peranakan Arab. Golongan tersebut didapatkan dari keturunan mereka yang dahulu sebagai seorang pemimpin (Raja, keturunan Nabi), orang terpandang (pemuka Agama, ahli kitab), dan orang yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok lain pada eranya. Sehingga keturunan mereka dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi juga seperti para leluhur mereka. Dalam usaha untuk mempertahankan marganya, maka keturunan ini memberikan klaim berupa marga di akhir nama depan mereka jika Ayah mereka merupakan keturunan dari golongan tersebut.

Sementara Al-Irsyad sendiri merupakan pecahan dari organisasi Jami'at Khair, yang terlahir akibat terjadinya suatu perbedaan pendapat antara golongan ningrat Arab (sayyid) dengan golongan Arab yang demokratis (syaikh), Ketegangan antara kedua golongan sayyid dengan golongan bukan sayyid di Indonesia terjadi saat fatwa yang dikeluarkan oleh Ahmad Surkati di Solo sebagaimana fatwa yang dikeluarkan Rasyid Ridha dari majalah Al-Manar kairo, yang mengemukakan bahwa pernikahan antara seorang Islam bukan sayyid dengan seorang syarifah adalah *jaiz* (dibolehkan).¹²

Menurut Steenbrink, pada tahun 1913 telah terjadi perpecahan di dalam kalangan Jami'at Khair mengenai hak istimewa golongan para sayyid, mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebih untuk sayyid, dikecam dan dicap sebagai golongan reformis dan kemudian mereka mendirikan organisasi *Jami'ah al-Islam wa al-Irsyad al-Arabiyyah*, atau secara umum sekarang

¹² Muh. Dahlan Thalib, "Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad dalam Pendidikan di Indonesia", Jurnal Studi Pendidikan Agama, Vol XVI, No. 1, Juni 2018, hlm. 4.

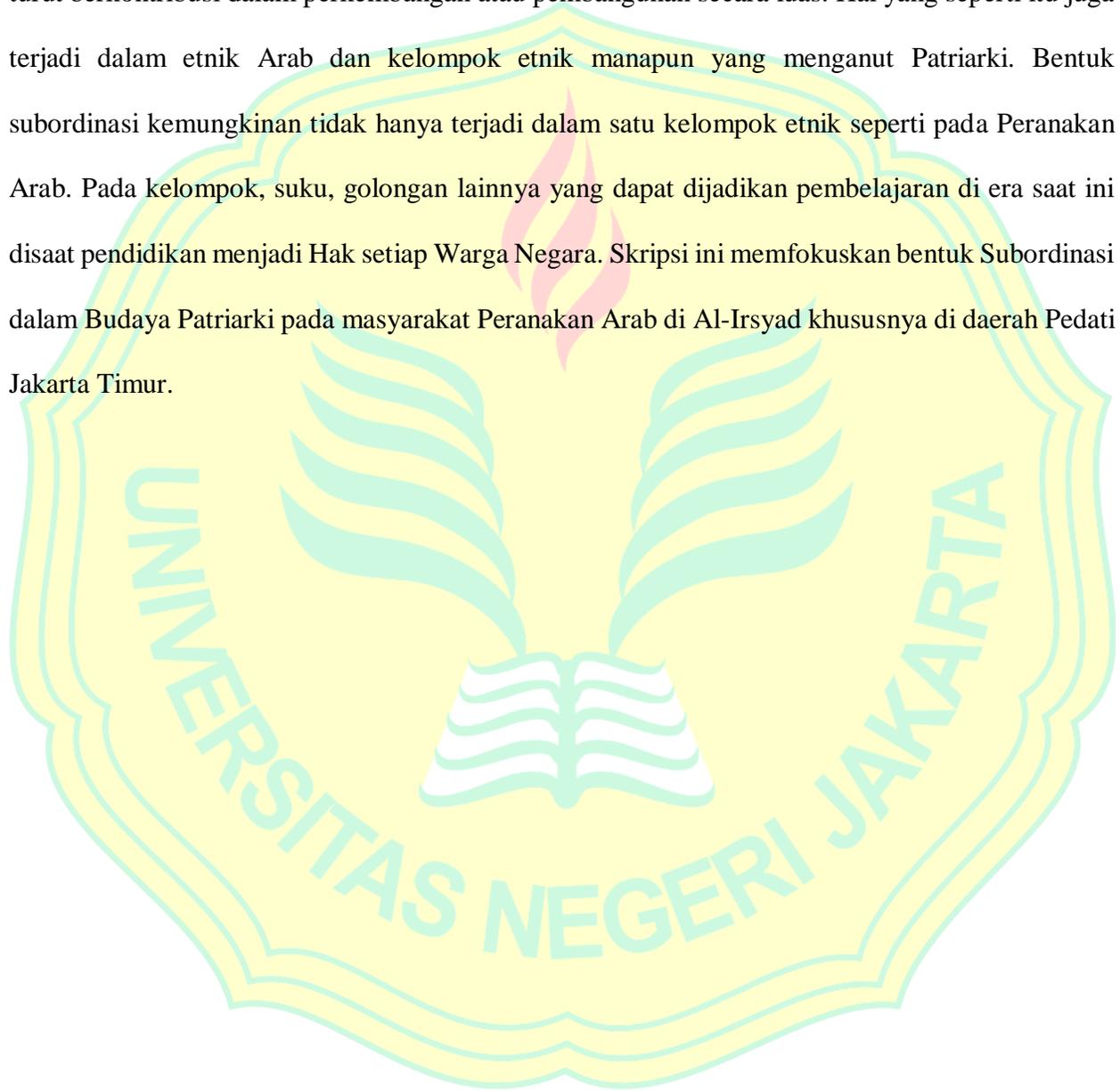
dikenal dengan Al-Irsyad. Al-Irsyad sendiri mulai dibentuk pada tahun 1913 dan mendapatkan pengesahan dari Kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915.¹³

Tokoh yang paling banyak berperan pada peristiwa ini ialah Syaikh Ahmad Surkati, ia mengeluarkan fatwa tentang jaiz atau sah dan dibolehkannya pernikahan yang menjawab pertanyaan Umar bin Said Sungkar ipar Awad Sungkar Al-Urmei, mengenai diperbolehkannya (*kufu*) kawin yang tidak sepadan (*kafa'ah*) yakni tidak sepadannya seorang “*syarifah*” menikah dengan seorang “non sayyid” meski keduanya sama-sama menganut agama Islam dan meski berbagai persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Menurut Ahmad Surkati Hukum kafa'ah seperti yang dikenal itu sepenuhnya tasingkir di Mesir, Sudan, di Hejaz dan di negara-negara Islam lainnya.

Ahmad Surkati tampil sebagai tokoh pemikir baru dalam masyarakat Indonesia. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan diantara sesama manusia, tidak peduli ia orang Arab atau tidak, tidak peduli ia sayyid atau bukan sayyid. Semua manusia sama, keturunan, harta, ataupun pangkat tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam, yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah SWT.

¹³ Harun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 161.

Dalam budaya Peranakan Arab perempuan seringkali dikonstruksikan selalu ada dibawah laki-laki, sehingga perempuan dinilai tidak perlu mengejar pendidikan tinggi. Perempuan selalu diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan domestik dan tidak bisa mengeluarkan potensinya untuk turut berkontribusi dalam perkembangan atau pembangunan secara luas. Hal yang seperti itu juga terjadi dalam etnik Arab dan kelompok etnik manapun yang menganut Patriarki. Bentuk subordinasi kemungkinan tidak hanya terjadi dalam satu kelompok etnik seperti pada Peranakan Arab. Pada kelompok, suku, golongan lainnya yang dapat dijadikan pembelajaran di era saat ini disaat pendidikan menjadi Hak setiap Warga Negara. Skripsi ini memfokuskan bentuk Subordinasi dalam Budaya Patriarki pada masyarakat Peranakan Arab di Al-Irsyad khususnya di daerah Pedati Jakarta Timur.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk Subordinasi pada perempuan Peranakan Arab di Al-Irsyad, Pedati, Jakarta Timur?
2. Apa penyebab pelanggaran subordinasi pada perempuan Peranakan Arab di Al-Irsyad, Pedati, Jakarta Timur dalam konteks budaya patriarki Arab dan narasi keagamaan (Islam)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan Penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menjelaskan bentuk-bentuk subordinasi yang dialami perempuan Peranakan Arab dalam kehidupan sehari-hari yang berlokasi di Al Irsyad, Pedati, Jakarta Timur.
2. Menjelaskan penyebab pelanggaran subordinasi pada perempuan Peranakan Arab di Al-Irsyad, Pedati, Jakarta Timur dalam konteks budaya patriarki Arab dan narasi keagamaan (Islam).

1.4 Manfaat Penelitian

a. Untuk Masyarakat Etnik Arab

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai etnik Arab, keadaan sosial penduduk di daerah tempat penelitian dan masyarakat lainnya. Tak terkecuali etnik dan suku lainnya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat heterogen. Dengan adanya kesadaran akan tingginya tingkat heterogen di wilayah ini maka sikap toleran akan semakin ditegakkan. Sehingga konflik horizontal pun dapat diminimalisir apabila terjadi pertentangan dalam masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang seperti kebudayaan, adat, pola perilaku yang berbeda dalam setiap kelompok dan golongannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada etnik Arab supaya memahami betul tentang kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi bahkan politik.

b. Bagi Perempuan

Penelitian ini diharapkan akan membuka pemikiran perempuan khususnya bidang pendidikan, sosial dan budaya. Era saat ini ketika penyeteraan, emansipasi, dan diperhatikannya masalah gender mulai gencar ditegakkan dinegara ini. Tetapi pada realitasnya masih ada perempuan yang masih merasa jika perempuan memposisikan diri diposisi setelah laki-laki. Bahkan kemungkinan laki-laki sendiri tidak menginginkan jika perempuan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Menurut laki-laki, pendidikan untuk kaum perempuan tidaklah dibutuhkan, rasa takut tersaingi menajadikan alasan kenapa hal tersebut terjadi. Diharapkan jika penelitian ini akan membuka pemikiran jika perempuan haruslah menjadi individu seutuhnya. Wujudnya berupa memperoleh Hak pendidikan dengan baik Serta diakui

keberadaanya khususnya dalam ranah privat (keluarga) jika perempuan dapat berpendapat dengan bebas.

c. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap dunia ilmu pengetahuan atau akademis. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Subordinasi. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan mampu melengkapi studi-studi mengenai sosiologi budaya dan gender kaitannya dengan bentuk Subordinasi Perempuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulis dalam menunjang penelitian, beberapa sumber pustaka yang dianggap dapat membantu penulis yang berkaitan dengan obyek penelitian Subordinasi dan Feminisme Islam dalam Peranakan Arab. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan penulis sebagai berikut:

Penelitian Pertama, berjudul “Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga” oleh Muhammad Nawir dan Risfaisal.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa perangan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Berdasarkan pengamatan Muhammad Nawir dan Risfaisal, penduduk desa tersebut memiliki pola yang berbeda atau pembedaan perlakuan ketika anak laki-laki dan perempuan lahir hal ini dikarenakan lingkungan didesa tersebut menganut sistem Patriarki.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.1.

Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Perempuan dipandang sebagai makhluk lemah, yang hanya bisa menangis ketika menghadapi permasalahan. Kesan ini mengakar kuat dalam masyarakat di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa memiliki pemahaman yang sama tentang hal ini. Tangisan perempuan merupakan sesuatu yang lazim dan biasa dalam kehidupan keseharian. Tak bisa dipungkiri, hal ini merupakan hasil pembentukan budaya yang tertanam sejak kecil. Seorang anak perempuan diizinkan untuk mengekspresikan perasaannya melalui tangisan, sedangkan jika anak laki-laki yang menangis orang dewasa akan segera menghardik dan mengatakan bahwa tidak pantas laki-laki menangis. Tanpa disadari, hal ini terbawa dalam kehidupan selanjutnya, meski telah dewasa perempuan terbiasa mengekspresikan perasaannya melalui tangisan sehingga muncul anggapan bahwa perempuan identik dengan sifat cengeng dan emosional sedangkan laki-laki tidak demikian.

Dalam perkembangan selanjutnya, hal itu dapat menyebabkan terbentuknya pandangan bahwa posisi perempuan adalah subordinat. Laki-laki selalu memimpin sedangkan perempuan menjadi pihak yang selalu dipimpin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak sejajar. Tidak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi (peribahasa), tetapi kedudukannya terjadi secara vertikal. Laki-laki berada di atas, perempuan berada di bawah. Kehidupan perempuan secara sosial berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Subordinasi Perempuan, menyebabkan muncullah stereotip.

Stereotip merupakan bentuk pembakuan suatu pandangan terhadap kelompok manusia dengan memberi ciri-ciri tertentu, tanpa memperhatikan kemampuan perseorangan. Pembakuan pandangan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Sampai sekarang pemahaman terhadap perempuan sebagai stereotip masih cukup besar. Hal ini diakui masih adanya kecenderungan

persepsi yang membenarkan bahwa dalam hal pembagian warisan, perempuan berhak memperoleh setengah bagian dari laki-laki. Begitu halnya dalam kegiatan berpolitik, para pemuka agama masih menganggap bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki.

Perempuan sebagai manusia yang memiliki sifat insani, seperti halnya laki-laki, perempuan akan belajar tentang kehidupan berdasarkan pengalamannya. Akan tetapi, perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan pengalaman. Perempuan harus merasakan haid, hamil, melahirkan, menyusui yang merupakan pengalaman yang tidak akan pernah terjadi pada laki-laki pada umumnya. Hal inilah yang lebih mendorong perempuan berusaha memelihara kehidupan dengan belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman kaumnya.

Secara akal sehat sudah sepantasnya apabila perempuan bebas menentukan apa yang akan dilakukan di dalam melaksanakan tugas manajemen kehidupan ini. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan, perempuan tidak lagi mempunyai hak untuk mengatur kehidupan. Segala aspek kehidupan ditentukan oleh suatu kekuatan di luar kehidupan kaum perempuan. Kekuatan tersebut adalah politik. Politik yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki atau para suami.

Penelitian kedua, berjudul “Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta” oleh Dewi Ulya Rifqiyati.¹⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan salah satu suku bangsa di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan Arab. Sebagai masyarakat pendatang, nampaknya keturunan Arab masih lekat dengan bentuk sistem kekerabatan yang mereka dapatkan dari tanah kelahiran. Selanjutnya, dalam perkembangannya mereka pun masih tetap mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menghubungkan dirinya kepada

¹⁵ Ulya Rifqiyati, Dewi, Tesis: “*Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

ayahnya dan masuk ke dalam klan ayahnya. Komunitas yang menganut sistem patrilineal ini, diyakini datang ke Indonesia dengan menyebar ke seluruh penjuru wilayah nusantara. Dalam perkembangannya, mayoritas warga Arab maupun keturunannya di Indonesia diyakini berasal dari Hadramaut, suatu provinsi di wilayah Yaman bagian Selatan.

Pada mulanya keturunan Arab yang datang ke Indonesia umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Misalnya di Jakarta (Pekojan), Surakarta (Pasar Kliwon), Surabaya (Ampel), Malang (Jagalan), Cirebon (Kauman), Probolinggo (Diponegoro) serta masih banyak lagi yang tersebar di kota-kota seperti Palembang, Banda Aceh, Sigli, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Gorontalo.

Hubungan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia sejauh ini dapat terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Maka dari itu, walaupun berbeda dalam suku bangsa tetapi memiliki solidaritas yang kuat dari segi keagamaan. Ditambah lagi, sosial budaya masyarakat etnis keturunan Arab masih mempraktekkan tradisi dan budaya tertentu yang turun-temurun diwarisi oleh nenek moyangnya terutama dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang masih sesuai dengan budaya pribumi.

Sebagai masyarakat yang berdiaspora, keturunan Arab Hadrami di Yogyakarta menjaga identitas kelompoknya. Keberadaan mereka digambarkan dalam bentuk kegiatan tradisi turun-temurun yang berasal dari subkultur budaya Arab. Dalam perjalanan penelitian, banyak kendala yang ditemui untuk menggali budaya keturunan Arab di Yogyakarta. Dimana yang ditemui di lapangan, keturunan Arab di Yogyakarta lebih cenderung bersifat eksklusif dan kurang terbuka dalam hal informasi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat segregasi antar kelas dalam keturunan Arab. Hal ini juga dikatakan oleh Berg, bahwasanya kelas tertinggi adalah kaum sayyid yang mengakui sebagai keturunan Nabi Muhammad saw melalui cucunya Hussein. Di bawah Ba'Alawy ada dua kelompok yang membentuk lapisan tengah masyarakat. Syekh dan yang kedua adalah Qabail. Kelompok ini mengklaim sebagai keturunan Qahtan, nenek moyang semua orang Arab Selatan. Syekh mengklaim kelompok mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada Qabil. Mereka adalah elit agama pribumi, keturunan teolog dan orang bijak yang memenuhi tugas yang sama dengan Ba'Alawy. Berdasar fakta empiris yang diperoleh bahwasanya ketiganya tersebut terutama kalangan sayyid dan masyaikh mengutamakan kesetaraan peringkat dengan mitra perkawinan, yang artinya perempuan tidak menikah di bawah status sosial mereka.

Masing-masing kelompok, baik Ba'Alawy maupun masyaikh senantiasa berusaha mempertahankan identitas kelompoknya. Hal ini terutama diterapkan terhadap anak keturunannya guna mempertahankan identitasnya. Adanya sikap fanatisme terhadap golongan masing-masing tersebut juga memberi pengaruh pada bentuk perkawinan yang mereka terapkan. Relevansinya terhadap bentuk perkawinan yang dianut, bahwasanya baik bagi kalangan sayyid maupun non-sayyid tetap memberlakukan perkawinan endogami dalam sistem kekerabatan. Bahkan diungkapkan bahwa bagi kalangan sayyid secara tradisi yang turun- menurun tidak dapat menerima pernikahan dengan keturunan Arab non- sayyid. Hal ini dikarenakan adanya anggapan tidak adanya kesepadanan (kafā'ah) di antara mereka.

Dalam tradisi dan adat istiadat komunitas keturunan Arab, legalitas perkawinan ditentukan pada kesetaraan nasab. Pada golongan Ba' Alawy, kafā'ah dapat diartikan sebagai pernikahan sesama golongan Ba' Alawy dan atau satu derajat, yaitu sesama keturunan Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan untuk menjaga nasab suci yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada Nabi

Muhammad saw. Demikian halnya dalam kalangan Arab pada golongan Masyaikh, yang juga masih mempertahankan kesetaraan nasab. Namun demikian, perbedaannya adalah pada golongan Masyaikh dilakukan hanya atas dasar tradisi yang telah turun-menurun.

Perkawinan endogami dalam konteks keturunan Arab di Yogyakarta memberikan dampak positif pada kekerabatan mereka. Hal ini dikarenakan dengan adanya perkawinan endogami, maka keberlangsungan kebudayaan dan pemeliharaan budaya Arab. Terutama dalam pemeliharaan sistem patriakal. Berdasarkan fakta empiris di lapangan, nyatanya telah terjadi hubungan tarik menarik pada praktik perkawinan endogami ke arah eksogami. Sebagai etnik yang berdiaspora, keturunan Arab di Yogyakarta secara tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai budaya lokal. Persinggungan dengan budaya lokal tersebut yang tampaknya menjadi pengaruh adanya dinamika dalam perkawinan endogami ke arah eksogami tersebut.

Penelitian ketiga, berjudul “Menelaah Feminisme dalam Islam” oleh Ariana Suryorini.¹⁶ dalam penelitian ini menjelaskan feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur’ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujud dalam pernyataan klasik: kepada Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam Qur’ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam. Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan al-Qur’an.

¹⁶ Ariana Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam”, (Jurnal Walisongo, 2012, Vol.7, No.2).

Gerakan feminisme Islam (harakah tahrir al-mar'ah) dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia, berlangsung dalam beberapa cara. *Pertama*, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan training-training gender, melalui seminar- seminar maupun konsultasi-konsultasi. Kegiatan seperti ini dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsen dengan persoalan-persoalan keperempuanan. Selain itu, lembaga-lembaga dalam konsen ini juga dikenal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Negara yang dinilai merugikan keberadaan perempuan.

Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqih pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, Hak-Hak Reproduksi Perempuan. *Ketiga*, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam, yang berhasil menempatkan perempuan yang benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. *Keempat*, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan pendekatan hermeneutika dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkis tersebut.

Menurut para feminis, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka. Bagi para feminis laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda kecuali dari sisi biologis saja, dimana perempuan bisa mengalami menstruasi,

mengandung, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki tidak. Inilah yang disebut dengan kodrat perempuan, yang berbeda dengan kodrat laki-laki. Selebihnya, perbedan-perbedaan lain yang terjadi pada laki-laki dan perempuan hanya terjadi akibat konstruk sosio-kultural saja. Perbedaan biologis, dengan demikian sama sekali tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin secara sosial. Fungsi-fungsi biologis tidaklah sama, dan memang harus dibedakan, dengan fungsi-fungsi sosial.

Penelitian keempat, berjudul “Hak-hak Wanita Muslim dan Pendidikan” oleh Sharifah Nooraida Wan Hasan dan Raihanah Abdullah.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan Pendidikan di Malaysia memiliki landasan berupa keadilan pada kurikulumnya. Kurikulum pelaksanaan pembelajarannya, dan tindakan guru merupakan aspek pada bentuk keadilan tersebut ditegakkan.

Gerakkan memperjuangkan hak asasi manusia juga terdapat dalam strategi kurikulum mereka. Pedagogi merupakan salah satu target utama yang perlu diperhatikan dalam menarik minat pelajar dalam melibatkan diri selama pemberian materi pendidikan hak asasi manusia dilaksanakan. Sehingga, unsur dalam menuntut keadilan dapat mereka pelajari di lingkungan sekolah secara baik. Penelitian ini menjelaskan pula gerakan untuk memperjuangkan hak perempuan. Pada awalnya mereka mengadabtasi gerakan perempuan di timur tengah dipelopori oleh Huda Sha’rawi seorang feminis berasal dari Mesir.

Huda Sha’rawi mendapat sambutan besar di negaranya atas segala usaha pembelaan terhadap hak-hak perempuan pada tahun 1945. Pergerakan perempuan di Malaysia tidak menjadikan teori Barat dalam ideologi feminisme sebagai teori yang diamalkan di Malaysia. Teori Barat yang terdiri daripada paham feminisme radikal, marxis dan sosialis, liberal serta pascamoden

¹⁷ Sharifah Nooraida Wan Hasan dan Raihanah Abdullah, “*The Rights Of Muslim Women’s And Education*”, (*Journal Of Shariah Law Research* 19-40, 2016, Vol. 1, No. 1).

tidak dijadikan asas kepada perjuangan gerakan perempuan di Malaysia. Perjuangan feminisme Islam di Malaysia adalah perjuangan untuk pembebasan dari dominasi dari kaum lelaki yang berlandaskan agama tanpa menentang kepercayaan mereka dan menyesuaikan pada kasus tertentu yang terkait pada masalah gender atau penindasan terhadap suatu kaum/kelompok. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan hidup negara tersebut apabila suatu kaum khususnya perempuan apabila hak-hak tidak dapat diterima.

Kesadaran perempuan terhadap hak-hak perempuan sangatlah mempengaruhi kegiatan salah satu kegiatan perpolitikan di negara ini, perempuan muslim memperjuangkan hak mereka dengan mengkaji Al-Qur'an dan tidak melenceng dari ajaran agama. Faktor lain mengenai munculnya Pergerakan perempuan Islam di Malaysia, ketika penerapan Undang-Undang Keluarga Islam digunakan namun gagal memberikan keadilan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sekaligus gagal mencerminkan gaya hidup Islam yang sebenarnya.

Feminisme Islam di Malaysia sendiri muncul yang didasari pada dominasi oleh kaum laki-laki yang mengganggu kesejahteraan kehidupan khususnya kaum perempuan. Pelanggaran hak untuk kaum perempuan sendiri dilakukan oleh Islam atas nama Islam, Kejayaan perempuan di Malaysia sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan bersifat grass root (mengakar) yang dirancang dan dikendalikan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memperjuangkan, memperbaiki dan mempertingkatkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek. Dalam usaha untuk menuntut keadilan hak-hak melalui sistem perundangan Islam, perkumpulan atau kelompok perempuan perlu terlibat secara aktif dalam projek penafsiran teks dan undang-undang Islam. Perempuan mulai mengambil inisiatif untuk menjadikan Islam sebagai senjata utama dalam perjuangan feminisme. berbagai usaha yang dilakukan untuk membantu pergerakan ini antaranya dalam bidang penulisan.

Wujud dari pengimplementasian gerakan feminisme sendiri berupa karya tulis yang banyak mengandung unsur pengkajian, terhadap Al-Quran seperti didalam karya “Hak Asasi manusia” yang didalamnya terdapat model mengenai hak-hak manusia khususnya pada bidang pendidikan, kajian pada perempuan, nilai, kesadaran, hingga transformasi. pengajian berkaitan materi hak-hak perempuan di kalangan siswa, Al-Quran dan hadist sebagai model utama dalam mendidik perempuan. Penelitian undang-undang yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadist merupakan keperluan dalam merancang pendidikan berkaitan perempuan. Pengajaran hak-hak perempuan muslim tersebut masing-masing diterapkan dalam pedagogi melalui enam subjek yang berikut iaitu Hak-Hak Perempuan, Hak Asasi Manusia, Politik Timur Tengah, Islam dan Gender, Perempuan dan Isu Gender dalam Islam dan subjek Kemanusiaan merangkumi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Sains Kemasyarakatan.

Penelitian kelima, jurnal internasional berjudul “*Arab Women’s Education and Gender Perceptions: An Insider Analysis*” oleh Amani Hamdan.¹⁸ Penelitian jurnal ini menjelaskan dalam Islam, pria dan wanita memiliki agama, tugas moral, dan tanggung jawab yang sama. Namun, penulis berpendapat bahwa tradisi budaya yang mengatur masyarakat Muslim Arab menundukkan perempuan. Pada bagian ini penulis menyoroti beberapa aspek yang saling bertentangan antara tradisi budaya di satu sisi dan agama di sisi lain. Walaupun penulis tidak bermaksud membahas semua aspek konflik itu, penulis membahas aspek-aspek yang muncul dalam narasi narasumber yang diwawancarai.

Meskipun banyak Muslim berpendapat bahwa Islam mendefinisikan peran dan tanggung jawab gender (Vidyasagar & Rea, 2004), peran gender tampaknya lebih banyak dibangun oleh

¹⁸ Amani Hamdan, “*Arab Women’s Education and Gender Perceptions: An Insider Analysis*”, (*Journal Bridge*, 2006, Vol. 1, No. 8).

praktik budaya daripada oleh Al-Quran dan Hadis. Namun, selama bertahun-tahun, kebiasaan-kebiasaan pra-Islam tertentu telah muncul kembali dan mendapatkan pijakan (Jawad, 1998). Adat-istiadat budaya yang mengingkari kesetaraan perempuan telah mengakar dalam budaya Muslim Arab ke titik di mana mereka sering diterima sebagai aturan Islam. Namun, banyak kebiasaan atau aturan yang dipatuhi saat ini tidak dapat ditemukan dalam teks-teks Islam.

Ajaran Islam, seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam Al-Quran dan Hadis otentik sangat menekankan pentingnya pendidikan dan mendorong partisipasi perempuan dalam semua bidang publik. Penafsiran Alquran yang sempit dan sempit, yang dibuat oleh para sarjana laki-laki, berkenaan dengan perempuan bersifat patriarkal, misogynis, dan telah berdampak negatif pada perempuan dalam hal praktik-praktik Muslim Arab.

Pengalaman dan persepsi wanita Muslim Arab disajikan dalam penelitian ini yang mengartikulasikan keyakinan mereka dan bergulat dengan kompleksitas klaim identitas Muslim dalam konteks yang berbeda dan berkontribusi dalam konteks yang bermakna dan relevan dengan penelitian ini. Mereka telah berhasil "membuat perlawanan terhadap suasana pikiran yang dominan", dan karena pendidikan mereka, mereka mampu terlibat dalam debat 'Islam dan wanita dan mendapatkan manfaat darinya. Seperti Mukudi, penulis merasa bahwa wanita Muslim Arab yang diwawancarai "tidak memvisualisasikan diri mereka sendiri menantang posisi mereka yang ditentukan secara budaya. Sebaliknya, mereka mencari peluang yang akan membuat pengalaman mereka menjadi lebih baik melalui pendidikan"(p. 239).

Tabel 1. 1 Perbandingan Telaah Pustaka

No	Peneliti	Tahun	Bentuk Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nawir dan Risfaisal	2015	Jurnal Nasional	Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas berbagai bentuk subordinasi pada perempuan - Menjelaskan peran dan perilaku kepada laki-laki dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian pada masyarakat suku Enrekang Sulawesi.
2.	Dewi Ulya Rifqiyati	2017	Tesis	Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang perempuan keturunan Arab - Menjelaskan tentang budaya perkawinan di keturunan Arab 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian pada masyarakat keturunan Arab di Yogyakarta - Penelitian bertema perkawinan
3.	Ariana Suryorini	2012	Jurnal Nasional	Menelaah Feminisme dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tentang feminisme dalam Islam - Membahas bentuk gerakan feminisme Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tentang tafsir dari hadist dan ayat Al-Qur'an secara hermeneutik
4.	Sharifah Nooraida Wan Hasan dan Raihanah Abdullah	2016	Jurnal Nasional	Hak-hak Wanita Muslim dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan hak-hak perempuan dalam pendidikan - Memberikan penjelasan terkait ayat yang menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian kepada pendidikan perempuan muslim

5.	Amani Hamdan	2006	Jurnal Internasional	<i>Arab Women's Education and Gender Perceptions : An Insider Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan budaya perkawinan keturunan Arab - Membahas kesetaraan dalam Islam dan benturannya dengan budaya Arab 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfokuskan pembahasan kepada patriarki
----	--------------	------	----------------------	--	--	---

Diolah dari studi Pustaka, 2020

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Subordinasi

Perbedaan gender sebetulnya bukan sebuah masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya subordinasi.¹⁹

Subordinasi artinya, "subordinasi berarti memiliki lebih sedikit kekuatan atau otoritas daripada orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi".²⁰ Laki-laki memandang perempuan secara fundamental berbeda dari diri mereka sendiri, perempuan direduksi menjadi status jenis kelamin kedua dan karenanya menjadi subordinat. Kemampuan laki-laki untuk mendominasi perempuan secara fisik seringkali dikemukakan sebagai alasan utama penindasan perempuan dan mekanisme yang melanggengkan subordinasi tersebut.²¹

¹⁹ Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 15-16.

²⁰ Albert Sidney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University Press), hlm. 1296.

²¹ Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, (New York: Vintage Books), hlm. 125.

Fakih menjelaskan subordinasi ialah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Hal itu dapat terjadi karena keyakinan terhadap jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih unggul ialah laki-laki, telah dikonsepsikan secara turun temurun.

Laki-laki menjadi superordinat dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan dengan perempuan, dijalankan berdasarkan pemahaman mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga harus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Perbedaan yang terjadi terhadap kaum perempuan mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal hingga lingkungan kerja. Kaum perempuan seringkali kurang mendapatkan kesempatan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial apabila dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena, realitas, dan fakta-fakta sosial budaya sebagaimana dikemukakan memperlihatkan dengan jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris yang timpang, yang tidak setara, dan diskriminatif.

1.6.2 Budaya Patriarki

Ketidakadilan gender di banyak daerah bahkan di beberapa negara masih sering disebabkan oleh faktor budaya. Masalah tersebut datang dari masyarakat yang berkaitan dengan sistem norma dan nilai budayanya masing-masing. Nilai dan budaya tersebut erat kaitannya dengan sesuatu yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, yang dalam hal ini adalah perempuan. Kepantasan dan atau ketidakpantasan, berkaitan dengan persepsi kelompok

masyarakat yang bersangkutan. Norma dan nilai budaya ini dari satu tempat ketempat lain akan berbeda.

Kata 'patriarki' secara harfiah berarti aturan dari ayah atau 'patriark', dan aslinya digunakan untuk mendeskripsikan jenis 'keluarga yang didominasi laki-laki' - rumah tangga besar dari patriark yang mencakup perempuan, laki-laki junior, anak-anak, budak dan pembantu rumah tangga semuanya di bawah kekuasaan laki-laki yang dominan ini. Sekarang ini digunakan secara lebih umum "untuk merujuk pada dominasi laki-laki, pada hubungan kekuasaan di mana laki-laki mendominasi perempuan, dan untuk mencirikan sistem di mana perempuan tetap menjadi subordinat dalam beberapa cara"²²

Ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa laki-laki selalu memiliki peran dominan, atau maskulin, dan perempuan selalu memiliki peran subordinat atau feminin. Ideologi ini begitu kuat sehingga laki-laki bisa mendapatkan persetujuan yang jelas dari perempuan yang mereka tindas. Mereka melakukan ini melalui institusi seperti akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masing membenarkan dan memperkuat subordinasi wanita kepada pria. Sistem patriarki dicirikan oleh kekuasaan, dominasi, hierarki, dan persaingan. Jadi patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan.²³

Patriarki dalam pengertian yang lebih luas berarti perwujudan dan pelembagaan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak dalam keluarga dan perluasan dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat pada umumnya. Ini menyiratkan bahwa laki-laki memegang kekuasaan di semua lembaga penting masyarakat dan bahwa perempuan kehilangan akses ke

²² Kamla Bhasin, *What is Patriarchy*, (New Delhi: Women Unlimited, 2006), hlm. 3.

²³ Kate Millet, *Sexual Politics*, (London: Virago, 1977), hlm. 35.

kekuasaan tersebut. Namun, ini tidak menyiratkan bahwa perempuan benar-benar tidak berdaya atau benar-benar dirampas hak, pengaruh, dan sumber daya.²⁴

Menurut Walby, konsep ‘patriarki’ masih sangat diperlukan untuk memahami ketidaksetaraan gender.²⁵ Ia membangun landasan argumennya dalam keenam postulat berikut, yang ia sebut sebagai enam struktur dasar patriarki, yaitu:

- 1) Patriarki beroperasi melalui pekerjaan yang dibayar di mana perempuan menghadapi segregasi horisontal dan vertikal yang mengarah secara sistematis dalam sistem pengupahan kapitalisme.
- 2) Patriarki beroperasi melalui pembagian kerja berdasarkan gender dalam rumah tangga yang memaksa perempuan untuk mengambil tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, meskipun perempuan sedang dalam pekerjaan penuh-waktu di luar rumah. Perempuan mungkin terjebak dalam pernikahan yang tidak memuaskan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang dibayar dengan baik untuk mendukung diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.
- 3) Perempuan selalu dalam “kerugian budaya” yang mengglorifikasi femininitas, yang mana bila perempuan menolak itu, ia akan mengalami kerugian-kerugian budaya.
- 4) Hubungan heteroseksual dilihat oleh Walby pada dasarnya patriarkal, meskipun Sylvia Walby berpendapat bahwa perempuan telah mendapat beberapa keuntungan dalam hal ini, misalnya akibat kontrasepsi modern dan liberalisasi aborsi dan perceraian dalam hukum.
- 5) Patriarki sering ditopang oleh kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

²⁴ Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy*, (New York: Oxford University, 1989), hlm. 239.

²⁵ Sylvia Walby, *Op.Cit.* hlm. 268.

- 6) Patriarki ditopang dan dipelihara dengan baik oleh negara, yang meskipun mungkin ada beberapa reformasi terbatas, seperti kesempatan pendidikan lebih adil dan hukum perceraian lebih mudah yang telah melindungi perempuan terhadap patriarki sampai batas tertentu, tetapi negara tetaplah patriarkis.

Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (*private*) menuju kolektif (*public*). Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang publik; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadikan mereka sebagai sapi-perah yang menguntungkan dalam konsep buruh murah dan atap-kaca yang tak pernah pecah (*never shattered glass-ceiling*). Perempuan (tidak lagi atau masih) dieksploitasi oleh leluhur-individu (yaitu ayah atau suami) tetapi dieksploitasi oleh orang-orang secara kolektif di ruang publik (dalam profesi dan pekerjaannya). Walby juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer berbagai kelompok perempuan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kombinasi kebijakan publik yang buta-gender dan kepentingan rumah keluarga kaya (misal paling getir di Indonesia adalah berpindahnya perempuan TKW Indonesia ke dalam keluarga kaya di Saudi Arabia via kebijakan negara yang tidak melindungi buruh migran).

Walby juga menguraikan bagaimana patriarki melakukan transformasi dengan berubah bentuk wajah yang diakselerasi oleh percepatan globalisasi. Yaitu bahwa segolongan perempuan muda telah lebih maju secara pendidikan dari ibu-ibunya yang lebih tua. Perempuan-perempuan muda ini mendapatkan banyak ruang dalam perjuangan-perjuangan sosial demokrasi, perlindungan alam, dan melawan perdagangan manusia, misalnya. Tetapi mereka, kelompok perempuan baru ini, masih memiliki ciri ketertindasannya, yaitu sebagai ibu tunggal, atau sebagai

perempuan lajang, atau justru masih bergantung sepenuhnya pada suaminya, dan lain-lain, yang kemudian membuatnya sulit untuk mencapai posisi yang adil dalam struktur kerja kapitalisme.

1.6.3 Perempuan Peranakan Arab

Seorang perempuan Peranakan Arab dibatasi dengan berbagai aturan pergaulan dilingkungan sosial yang berguna untuk menjaga kehormatan seorang Ayah yang selalu merasa takut anaknya akan mendapatkan pergaulan atau lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Karena itu orang tua berusaha mengikat anak perempuannya ke perjodohan dengan sebuah keluarga yang masih memiliki silsilah keturunan Arab. Perempuan haruslah menuruti dan memenuhi kebutuhan dan kemauan laki-laki tanpa ada perlawanan dari perempuan. Banyak perempuan Arab yang menikah pada usia belia, sekitar usia 15-18 tahun demi menjaga kehormatan dan mengukuhkan posisi laki-laki sebagai penguasa dan terjadinya tindak diskriminasi terhadap perempuan.²⁶

Salah satu ciri khas masyarakat keturunan Arab di Indonesia ialah mempertahankan konsep kufu' dalam pernikahan. Kufu' dalam pandangan masyarakat keturunan Arab sudah menjadi aturan turun temurun yang masih lestari sampai saat ini. Tradisi Arab terbawa kemanapun mereka berpindah tempat akhirnya sampai pula ke Nusantara. Masyarakat keturunan Arab yang tinggal di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, Keturunan Habaib atau Alawiyin yang mana nasabnya lebih dekat kepada keturunan Husein bin Ali cucu Rasulullah SAW. Kedua, Keturunan Arab Syekh atau Jamaah yang berasal dari keturunan Yaman.²⁷

²⁶ Abu Lama Odeh, *Berbagai Kejahatan Demi Kehormatan Dan Pemahaman Tentang Jender Dalam Masyarakat Arab Dalam Feminisme Islam. Mai Fuyami (Ed IV)*, (Jakarta: Nuansa Cendikia, 2000), hlm. 144.

²⁷ Majid Bahafdullah, *Dari Nabi Nuh sampai Orang Hadramaut di Indonesia*, (Jakarta: Bania Publishing, 2010), hlm. 167.

Benih perbedaan pandangan terhadap konsep kufu berawal dari pertanyaan seorang keturunan alawi kepada seorang Syeikh Ahmad Surkati salah satu pendiri Jamiatul Khair (organisasi keturunan arab pra kemerdekaan) terkait konsep kufu. Seorang alawi bertanya kepada syeikh tersebut bagaiman hukumnya seorang syarifah menikah dengan ajam (non arab). Maka mufti tersebut menjawab pernikahannya sah dan dibolehkan menurut syariat Islam. Dengan jawaban beliau keturunan alawi tidak sependapat dan mulai memisahkan diri, sehingga keturunan arab terbagi menjadi dua yaitu Arab Alawi atau habaib dan Arab Jamaah atau Syeikh.²⁸ Karena perbedaan tersebut Syeikh Ahmad Surkati memutuskan untuk mundur dari Jamiatul Khair. Pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H) mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah, serta organisasi Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-Arabiyah (kemudian berganti nama menjadi Jam'iyat al-Islah wal-Irsyad al-Islamiyyah) sebagai lembaga yang mengayominya.

Rabiatul Adawiyah menyimpulkan bahwa dalam tinjauan sosiologis kafaah masih berlaku dan dapat diterapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Ada beberapa konsep kafaah dalam kajian fiqih yang masih bisa diterapkan dalam perkembangan masyarakat muslim salah satunya kesetaraan dalam agama (diyanah). Konsep kafaah lainnya juga tidak dapat dikesampingkan antara lain, kafaah dalam nasab, agama dan profesi. Tujuannya menentukan kafaah bukan untuk menyusahkan seorang muslim, akan tetapi memberi jaminan bagi wanita dari kegagalan dan konflik rumah tangga. Dengan diterapkan konsep kafaah harapannya dapat tercipta keluarga yang sakinah.²⁹

²⁸ Mobini, Natalie K, *Hadrami Awakening Kebangkitan Hadrami di Indonesia*. (Jakarta: Akbar Media, 2007), hlm. 21.

²⁹ Jamal, "Pergeseran Konsep Kufu Menurut Masyarakat Keturunan Arab", (Jurnal Ulumuddin: Malang, Vol.11, No.1, 2018), hlm. 7.

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Pemaparan kerangka konsep yang dilakukan pada penelitian penulis mengambil teori gender patriarki dari Sylvia Walby yang menggambarkan budaya patriarki yang terbagi menjadi patriarki privat dan patriarki publik yang dalam penelitian ini terjadi pada perempuan Peranakan Arab. Selanjutnya, penulis mengambil salah satu bentuk ketidakadilan gender yaitu subordinasi. Penulis akan membahas bentuk-bentuk subordinasi serta pelanggeng subordinasi yang dialami perempuan Peranakan Arab.

Skema 1. 1 Konsep Budaya Patriarki dan Subordinasi Perempuan Peranakan Arab



Sumber: Pemetaan Konsep Peneliti, 2020

1.7 Metodologi Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan disesuaikan dengan abstrak studi kasus yang akan penulis gunakan pada penelitian ini. Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur pengumpulan data yang spesifik dari partisipan.

Menurut Creswell dalam studi kasus kualitatif, seseorang dapat menyusun pertanyaan maupun sub pertanyaan melalui isu dalam tema yang dieksplorasi, juga sub pertanyaan tersebut dapat mencakup langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan data, analisis dan konstruksi format naratif.³⁰ Menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Strategi penelitian menggunakan strategi menggunakan strategi studi kasus pada delapan perempuan Peranakan Arab di Al Irsyad, yang didalamnya penulis akan menyelidiki secara cermat individu. Penelitian subordinasi perempuan peranakan Arab juga dibatasi oleh ruang waktu dan aktivitas, dan penulis mengumpulkan informasi yang lengkap dengan berbagai prosedur pengumpulan data pada waktu yang sudah ditentukan.

³⁰ JW Creswell. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Terjemahan)*. diterjemahkan oleh : Achmad Fawaid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 105.

Kemudian penulis mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman hidup manusia dengan mengembangkan relasi dan pola makna.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan mengenyampingkan terlebih dahulu pengalaman pribadi, agar dapat lebih memahami pengalaman informan yang akan diteliti.

1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek yang ada pada penelitian ini adalah perempuan Peranakan Arab. Subjek yang akan menjadi Informan dalam penelitian Subordinasi Perempuan dalam Budaya Patriarki Peranakan Arab yakni delapan perempuan dan satu laki-laki Peranakan Arab yang berada di Al Irsyad Pedati, Jakarta Timur. Selain ke-delapan perempuan dan satu laki-laki yang menjadi informan kunci, penulis membutuhkan beberapa informan lain yang dapat memperkuat argumenn seperti orang tua informan, tokoh penting didalam lingkungan masyarakat Al Irsyad yang menunjang penelitian.

Subjek penelitian ditentukan melalui observasi lokasi daerah yang dimana Al Irsyad Pedati, menjadi tempat berkumpul ke-delapan perempuan dan satu laki-laki yang menjadi subjek penelitian. Informan diseleksi berdasarkan teknik pengambilan sampel *snowball* dan *purposive*. Informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini umumnya digunakan bila penulis tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak untuk menjadi sumber. Kemudian Penulis memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap relevan untuk menjawab masalah penelitian.

³¹ Moustakas dalam *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Terjemahan)*, (California: SAGE Publications), 1994, hlm. 29.

Tabel 1. 2 Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Profesi
1.	Ibtisaam Basyrewan	Perempuan	20	Pelajar
2.	Fahimah Attamimi	Perempuan	21	Mahasiswa
3.	Hakimah Attamimi	Perempuan	17	Pelajar
4.	Mia Thaalib	Perempuan	17	Pelajar
5.	Ummu Salmah Al-Katiri	Perempuan	22	Mahasiswa
6.	Atika Aziz Balwe'el	Perempuan	28	Dosen/ Pengajar
7.	Fairus Al-As	Perempuan	52	Wiraswasta
8.	Vera Al-Jabry	Perempuan	50	Wiraswasta
9.	Anis Al-Katiri	Laki-laki	53	Wiraswasta

Sumber: Data Peneliti, 2020

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di kecamatan Jatinegara, kelurahan Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Alamat penelitian berada di Jl. Hj. Yahya No.17 RT.006 RW.07 atau sering disebut Pedati. Pemilihan lokasi ini berdasarkan domisili Informan yang berada di Pedati. Berdasar pengamatan penulis daerah Pedati memiliki penduduk peranakan Arab yang cukup dominan.

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sebanyak dua kali sehingga memiliki jarak waktu yang cukup lama. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai pada bulan November 2020.

1.7.3 Peran Peneliti

Peran penulis didalam penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor dari Subordinasi Perempuan dan bentuk dari Subordinasi Perempuan. Penelitian dimulai dari observasi tentang Al Irsyad Pedati, untuk mendapatkan rekomendasi mengenai informan yang sesuai dengan kredibilitas penelitian, kemudian penulis melakukan pendekatan dan membangun relasi kepada masyarakat sekitar untuk mencari informan. Untuk mendapatkan informan, penulis memilah berdasarkan informasi yang diterima dari Al Irsyad Pedati, jika Al Irsyad Pedati banyak didominasi oleh warga Peranakan dan keturunan Arab.

Letak Organisasi Al Irsyad dan lokasi penelitian sangat dekat dengan Jalan Raya Otto Iskandardinata. Tidaklah sulit untuk menemukan lokasi karena didukung perangkat lunak Google Maps dan dengan kemudahan akses seperti transportasi. Penulis sangat mudah beradaptasi dengan informan, sehingga mereka sangat terbuka menerima keberadaan penulis. Hal ini tentunya membantu dan membuat penulis tidak canggung dalam mengumpulkan data. Studi pustaka juga membantu penulis untuk menyusun argument dan pedoman observasi serta wawancara serta memberikan referensi kepada penulis dalam merangkai sisi sosiologis serta pendidikan dari penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik observasi.

Observasi yang penulis lakukan dengan cara observasi tidak terstruktur, hal ini dikarenakan observasi ini penulis harus mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek, observasi hanya dilakukan apabila dibutuhkan sehingga observasi tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian, penelitian ini memfokuskan pada studi sehingga penulis mencermati keadaan lingkungan sekitar untuk menentukan

informan. Penelitian ini juga menggunakan teknik Observasi partisipatif yang dimana Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana penulis benar-benar terlibat dalam keseharian informan.

2. Wawancara

Wawancara memungkinkan penulis untuk dapat mengumpulkan data yang beragam dari para informan dalam berbagai situasi dan konteks. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur ini bersifat lentur dan terbuka, Wawancara tidak terstruktur dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik umum bersama-sama dengan responden. Kelebihan dari teknik wawancara adalah dapat diperoleh keterangan secara langsung dan lebih personal. Penulis mewawancarai mengenai kebudayaan masyarakat Arab dan mengidentifikasi bentuk Hegemoni yang mereka alami. Selama penelitian berlangsung penulis sedikit mengalami kesulitan dalam hal wawancara jika pertanyaan dirasa akan menyinggung informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan dan memperkuat kevalidan data dari Informan dalam situasi dan konteks tertentu. Foto diambil berdasarkan dokumentasi pribadi maupun foto sebagai dokumen yang diberikan oleh informan. Foto pada penelitian juga disesuaikan dengan penjelasan dan keterangan mengenai data atau informasi terkait.

1.8 Triangulasi Data

Triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan sebuah data. Triangulasi data pada umumnya adalah metode yang digunakan saat pengumpulan data dan menganalisis data. Creswell menjelaskan bahwa konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap prasangka yang ada dalam sumber data, penulis dan metode akan dinetralisir ketika digunakan bersama sumber data, penulis dan metode yang lain.³² Semua informasi yang telah diterima penulis tidak langsung dianalisa, akan tetapi di bandingkan dengan hasil penelitian lain dan juga berguna untuk menguji validitas. Sehingga tidak ada hasil penelitian yang memihak satu pihak.

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan krosec data wawancara informan dalam keterkaitan dalam Subordinasi Perempuan dalam Budaya Patriarki di Peranakan Arab. Triangulasi juga digunakan untuk memandangkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi juga dapat meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Maka penulis akan mewawancarai ketua dari pengurus Putri Al-Irsyad dengan pertimbangan pemahaman kebudayaan dan wawasan mengenai perempuan khususnya di Peranakan Arab.

³² John W Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 162.

1.9 Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian hendaklah memiliki sistematika penelitian yang baik. penelitian kualitatif ini memiliki tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian ini terbagi-bagi menjadi lima bab dan beberapa sub-bab.

Bab I dalam penelitian ini berisikan mengenai latar belakang serta permasalahan penelitian yang terdiri dari dua buah pertanyaan. Dua buah pertanyaan tersebut bertujuan agar penulis lebih fokus terhadap suatu fenomena yang diteliti. Selanjutnya, terdapat juga tujuan penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metode dan sistematika penulisan. Semua itu bertujuan untuk mengetahui kerangka dasar dalam Hegemoni patriarki perempuan pada Peranakan Arab.

Bab II berisikan deskripsi mengenai keadaan sosial Peranakan Arab di gang Pedati, serta deskripsi wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu Jalan Hj. Yahya, Pedati, Jatinegara. Dalam bab ini dijelaskan pula sejarah masuknya Arab ke Indonesia khususnya Jakarta hingga akhirnya terbentuk organisasi ini, sejarah menyebarnya hingga ke Pedati serta perkembangan Peranakan Arab di wilayah ini, aksesibilitas menuju Al Irsyad Pedati, Latar belakang informan, dan potret sosial budaya kehidupan Peranakan Arab di Al Irsyad Pedati.

Bab III menjelaskan hasil dari temuan lapangan dan penelitian, yang telah penulis lakukan, pada bab ini mendeskripsikan bentuk Subordinasi Perempuan, Serta akan menjelaskan mengenai konteks Subordinasi dan Budaya Patriarki yang terjadi pada Perempuan Peranakan Arab di Al Irsyad.

Bab IV membahas dan mengulas hasil penelitian dan membahas pelanggaran subordinasi perempuan dalam konteks budaya patriarki Arab dan narasi keagamaan. Dalam bab ini terdapat analisa bentuk-bentuk kebertahanan Patriarki dan penyebab Subordinasi yang dirasakan oleh perempuan.

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penulis dalam menyimpulkan laporan hasil penelitian berdasarkan kajian sebelumnya. Pada bab ini terdapat jawaban berdasarkan pertanyaan dari permasalahan penelitian, dan berisikan referensi serta rekomendasi penulis apabila akan ada masukkan penelitian dikemudian hari.

